

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu berfungsi sebagai gambaran kerangka berpikir dan untuk mempelajari berbagai metode analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.

Pada penelitian Zahro (2012), tentang “Kontribusi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai KRPL, 2) manfaat fisik dari adanya KRPL, 3) mengestimasi biaya dan manfaat adanya pengembangan KRPL, 4) mengevaluasi keberlanjutan KRPL di Desa Banjarsari. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis rasio penerimaan atas biaya (*R/C ratio*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi rumah tangga sebelum adanya KRPL KEMPLING lahan pemanfaatan pekarangan sudah termanfaatkan namun belum optimal. Manfaat fisik dari KRPL KEMPLING mampu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Nilai *R/C* KRPL KEMPLING di setiap strata menunjukkan hasil yang menguntungkan. Pengembangan KRPL KEMPLING merupakan usaha sampingan bagi keluarga di Desa Banjarsari. Keberlanjutan KRPL KEMPLING ditinjau dari aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi mampu memberikan manfaat untuk individu rumah tangga, dan desa serta mampu menekan pengeluaran keluarga.

Firdausahadi, (2013) dalam penelitian “Peran Perempuan Pada Pemanfaatan Pekarangan Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Puhjark Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis peran perempuan dalam memanfaatkan dan mengelola lahan pekarangan pada program KRPL, 2) menganalisis pendapatan usahatani pekarangan yang diperoleh peserta KRPL dan non peserta KRPL, 3) menganalisis perbedaan pendapatan usahatani dari pekarangan peserta KRPL dan non peserta KRPL. Metode yang digunakan adalah analisis gender dengan teknik Harvard, analisis usahatani, dan analisis uji beda rata-rata (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam mengelola dan memanfaatkan

program KRPL berada pada kategori “Tinggi” atau “Positif”. Rata-rata pendapatan usahatani pekarangan peserta KRPL mencapai Rp 604.341,-/tahun atau Rp 51.197,-/bulan sedangkan pendapatan non peserta KRPL hanya sebesar Rp 349.818,-/tahun atau Rp 29.151,-/bulan. Hasil analisis uji beda rata-rata diperoleh nilai t hitung sebesar 4,739. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan usahatani pekarangan peserta KRPL berbeda nyata dengan pendapatan usahatani pekarangan non peserta KRPL.

Wibawa, Yasa (2013), meneliti tentang “Efektivitas dan Dampak Program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) Terhadap Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Petani di Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan”. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui tingkat efektivitas program SIMANTRI, 2) mengetahui dampak program SIMANTRI terhadap pendapatan rumah tangga, 3) mengetahui dampak program SIMANTRI terhadap kesempatan kerja rumah tangga di Desa Kelating. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan statistik uji beda non-parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program SIMANTRI sebesar 98,94 persen yang berarti tingkat efektivitas program SIMANTRI sangat efektif. Selain itu program SIMANTRI berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan dan kesempatan kerja rumah tangga petani di Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan.

Sutrisna, Tisnawati (2013), dalam penelitian “Analisis Pengaruh Efektivitas Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) di Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara Kota Denpasar”. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengetahui tingkat efektivitas program JKBM, 2) mengetahui adanya peningkatan pendapatan rumah tangga miskin sebelum dan sesudah menjadi peserta JKBM. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis efektivitas, dan uji statistik non-parametrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program bantuan JKBM sebesar 80 persen yang berarti bahwa bantuan JKBM sangat efektif. Selain itu program JKBM dapat merubah pendapatan serta menekan biaya kesehatan peserta JKBM.

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian yang akan

dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait tentang efektivitas program dan topik mengenai program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL). Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek (tempat, pelaku, aktivitas), permasalahan dan metode penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di RT 06 RW 02 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang dan obyek yang diteliti ialah rumah tangga sebagai pelaku kegiatan program M-KRPL. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program M-KRPL di RT 06 RW 02 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang, mengetahui perubahan pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah menjadi peserta M-KRPL, serta melihat pengaruh motivasi dan minat peserta terhadap keberhasilan program M-KRPL di RT 06 RW 2 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis efektivitas, tes *mc nemar* dan analisis regresi linier berganda.

2.2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat, dan manjur. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Alwi, 2005).

Menurut Halim (2007), efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (*target/result*). Sedangkan Mahmudi (2013) dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Jadi efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan semata-mata hasil dan tujuan yang dikehendaki (Mahmudi, 2013).

Menurut Cambel (1989), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Budiani (2007), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan program

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991), seperti pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri (1991)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Untuk menilai apakah suatu program efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan program itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Sehingga efektivitas adalah suatu ukuran untuk memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, serta orientasi pada keluaran yang dihasilkan.

2.3. Pendapatan

Pendapatan diartikan sebagai hasil dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Pengertian ini merujuk pada barang atau jasa yang dihasilkan maupun yang diperoleh. Menurut Poerwadarminta (1986), yang dimaksud dengan pendapatan adalah:

1. Hasil pencaharian (usaha dan sebagainya)
2. Sesuatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya yang sedianya belum ada)

Badan Pusat Statistik (BPS, 1990), merinci pendapatan dalam kategori sebagai berikut :

1. Pendapatan berupa uang, yaitu pendapatan:
 - a. Dari gaji dan upah yang diperoleh kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur, dan kerja kadang-kadang.
 - b. Dari usaha sendiri berupa hasil bersih dari usaha sendiri dan penjualan dari usaha rumah tangga.
 - c. Dari hasil investasi yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah.

- d. Dari keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
2. Pendapatan berupa barang, yaitu pendapatan berupa :
 - a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang berbentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.
 - b. Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah dan disewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

Menurut BPS, hasil survey tahun 1990 menggolongkan pendapatan penduduk dalam 4 golongan, yaitu:

1. Golongan berpendapatan rendah, bila rata-rata pendapatannya kurang dari Rp 150.000,00 perbulan.
2. Golongan berpendapatan sedang, bila rata-rata pendapatannya Rp 150.000,00 sampai Rp 450.000,00 perbulan.
3. Golongan berpendapatan menengah, bila rata-rata pendapatannya Rp 450.000,00 sampai Rp 900.000,00 perbulan.
4. Golongan berpendapatan tinggi, bila rata-rata pendapatannya lebih dari Rp 900.000,00 perbulan (BPS, 1990).

Dalam kaitannya dengan program M-KRPL, melalui berbagai jenis kegiatan, pendapatan masyarakat diharapkan dapat meningkat, sehingga keluarga akan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, dan dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, sehingga mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian (Laporan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun, 2008).

2.4. Motivasi

Kata motivasi (*motivation*) berasal dari bahasa latin *movere*, kata dasarnya adalah motif (*motive*) yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan (Nawawi, 2003).

Motivasi merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri yang perlu dipenuhi agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Motivasi adalah kondisi yang menggerakkan seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya (Mangkunegara, 2009).

Menurut Djamarah (2002), motivasi terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik yaitu:

- a. Kebutuhan (*need*), yaitu seseorang melakukan aktivitas (kegiatan) karena adanya faktor-faktor kebutuhan baik biologis maupun psikologis.
- b. Harapan (*expectancy*), yaitu seseorang dimotivasi oleh karena keberhasilan dan adanya harapan keberhasilan bersifat pemuasan diri seseorang. Keberhasilan dan harga diri meningkat dan menggerakkan seseorang ke arah pencapaian tujuan.
- c. Minat, yaitu suatu rasa lebih suka dan rasa keinginan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang atau pengaruh dari orang lain sehingga seseorang berbuat sesuatu.

Menurut Taufik (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik adalah:

- a. Dorongan, yaitu seseorang melakukan sesuatu bukan kehendak sendiri tetapi karena dorongan dari orang lain seperti keluarga, teman, dll.
- b. Lingkungan, yaitu tempat dimana seseorang tinggal. Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu.
- c. Imbalan, dimana seseorang dapat termotivasi karena adanya suatu imbalan sehingga orang tersebut ingin melakukan sesuatu.

Menurut Hariadja (2002) menyatakan bahwa jenis-jenis motivasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Motivasi sebagai dorongan internal

Motif atau dorongan sebagai kata kunci suatu motivasi dapat muncul sebagai akibat dari keinginan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan dimana kebutuhan ini muncul sebagai dorongan internal atau dorongan alamiah (naluri) seperti makan, minum, tidur, berprestasi, berinteraksi dengan orang lain, mencari kesenangan berkuasa dan lain-lain yang cenderung bersifat internal yang berarti kebutuhan ini muncul dengan menggerakkan perilaku semata-mata karena tuntunan fisik dan psikologis yang muncul melalui mekanisme sistem biologis manusia.

2. Motivasi sebagai dorongan eksternal

Kebutuhan juga dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi individu dengan lingkungannya, misal kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi sebagai dorongan biologis dapat berubah ketika ia berinteraksi dengan lingkungan kerja dimana disana terdapat suatu norma kelompok yang tidak menghendaki prestasi individu. Ini akan mengakibatkan motif berprestasi menurun, sebaiknya seorang yang tidak memiliki motif berprestasi yang tinggi dapat berubah ketika orang tersebut berada pada lingkungan kelompok kerja dimana prestasi individu sangat dihargai. Ini akan mengakibatkan munculnya motif berprestasi yang tinggi.

Menurut Mulyati dan Setiawan (2006) seiring dengan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas, peran perempuan dalam keluarga pun bisa berubah atau dalam hal ini bertambah, ia pun bisa ikut ber"usaha" layaknya seorang suami atau bapak di dalam keluarga. Ibu rumah tangga mulai melakoni usaha karena adanya dorongan untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka sehingga keuangan keluarga tidak hanya menjadi tanggungan kepala keluarga atau suami.

Menurut O' Connor et. al., (2003) dalam Mahastanti dan Nugrahanti (2010) menyatakan bahwa motivasi utama seorang perempuan bekerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sedangkan alasan bekerjasama dengan suaminya adalah untuk mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan dari pasangan mereka.

Menurut Ismail (2012) menyatakan bahwa faktor motivasi perempuan untuk bekerja berasal dari efek push (dorongan) dan pull (ketertarikan). Hal ini berarti bahwa niat melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor kebutuhan, nilai, keinginan, kebiasaan dan keyakinan.

Faktor push (pendorong) adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti 1) pengangguran, 2) pendapatan keluarga yang tidak memadai, 3) ketidakpuasan dengan pekerjaan saat ini, 4) kebutuhan jadwal kerja yang fleksibel, 5) peran model. Keputusan untuk bekerja yang berasal dari efek ketertarikan (pull) yang disebabkan oleh ekonomi yang berkembang menciptakan peluang untuk berusaha berhubungan dengan faktor-faktor seperti 1) perlu untuk kemerdekaan, 2) kesempatan untuk keuangan membaik, dan 3) potensi untuk mengembangkan hobi (Ismail, 2012).

2.5. Minat

2.5.1. Pengertian Minat

Minat merupakan hal yang penting bila dikaitkan dengan aktivitas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Minat yang ada pada seseorang memberikan gambaran dalam aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Minat merupakan suatu keinginan yang dimiliki oleh seseorang secara sadar. Minat juga berkaitan dengan perasaan seseorang tentang suka atau senang terhadap suatu objek atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.

Menurut Slameto (2010), minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Menurut Crow, 1986 (dalam Djaali, 2008), mengatakan minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Menurut Asher (dalam Hanani, 1995) minat merupakan aktivitas psikis manusia yang menyebabkan individu memberikan perhatiannya kepada suatu

objek yang kemudian diikuti, kecenderungan untuk mendekati objek tersebut dengan perasaan senang, karena individu mengetahui bahwa apa yang dikerjakannya itu akan mendatangkan hasil yang sesuai dengan harapannya.

Minat seseorang akan dapat menentukan aktivitas apa saja yang dipilihnya dan akan melakukannya dengan senang hati. Minat merupakan salah satu aspek psikis yang membantu dan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu minat adalah modal yang paling awal sebelum kita melakukan sesuatu yang kita inginkan atau permulaan dari semua kegiatan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu kecenderungan dari dalam diri individu yang menyebabkan individu tersebut mempunyai sikap, berkeinginan serta dorongan terhadap objek tertentu tanpa ada yang menyuruh.

2.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Minat

Menurut Crow (dalam Agatha, 2010), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat:

1. *The factor inner urge* adalah rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
2. *The factor of social motive* adalah minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal, disamping hal dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia juga dipengaruhi oleh motif sosial.
3. *Emotional factor* adalah faktor perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap obyek misal perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut.

Menurut Sri Hidayati (dalam Agatha, 2010), faktor yang mempengaruhi minat adalah:

1. Faktor Eksternal: Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi minatnya.

Contoh: lingkungan sekitar, sarana, prasarana, dan fasilitas yang digunakan.

2. Faktor Internal: Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak dapat dipusatkan.

Contoh: minat, ingatan, motivasi, dan kemauan.

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat adalah rangsangan yang datang dari lingkungan ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan seseorang, minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan juga dipengaruhi oleh motif sosial, perasaan dan emosi mempunyai pengaruh terhadap sesuatu kegiatan tertentu yang dapat membangkitkan perasaan senang. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi minat dapat berasal dari luar dan berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi minatnya.

2.6. Pemanfaatan Pekarangan

Pemanfaatan pekarangan mempunyai peranan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Potensi pekarangan mempunyai peluang untuk dikembangkan sehingga secara optimal dapat menopang kehidupan masyarakat. Pada pengembangan potensi pekarangan perlu adanya program yang terencana. Program yang terencana dalam pemanfaatan pekarangan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengelola yang melaksanakan kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian Pari (2004) menyatakan pekarangan sebagai salah satu praktek wanatani (agroforestri) sederhana, sangat dekat dengan kegiatan masyarakat sehari-hari dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengadakan TOGA atau dikenal dengan apotek hidup melalui lembaga PKK di setiap desa.

Karakteristik lahan pekarangan dengan ditandai beberapa indikator penting (Rukmana, 2008), antara lain sebagai berikut:

1. Meliputi areal yang sempit atau terbatas.
2. Berisi aneka tanaman.
3. Letaknya dekat dengan rumah.
4. Hasilnya yang diperoleh digunakan untuk keperluan sehari-hari.
5. Pada umumnya tidak memerlukan modal besar.

Fungsi pekarangan dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni fungsi ekonomis dan non-ekonomis. Pekarangan berfungsi ekonomis yaitu hasil pembudidayaan pekarangan dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup; sedangkan pekarangan berfungsi non-ekonomis yaitu hasil pembudidayaan pekarangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara tidak langsung (jasa lingkungan). Secara garis besar, pemanfaatan lahan pekarangan menurut lokasinya dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Di daerah pedalaman, pekarangan pada umumnya dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan gizi, obat-obatan, dan rempah-rempah serta untuk pelestarian lingkungan (Sastrapradja, *dkk*, 1979).
2. Di daerah pedesaan yang dekat dengan pusat konsumsi, pekarangan dimanfaatkan sebagai penghasil buah-buahan, sumber penghasilan, dan pelestarian lingkungan (Afrinis, 2009).
3. Di daerah perkotaan, pekarangan dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk perbaikan gizi, memberikan kenyamanan dan keindahan, serta melestarikan lingkungan (Rukmana, 2005).

Apabila pemanfaatan pekarangan diolah dengan baik, maka dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pekarangan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat di pedesaan yang banyak bergantung dari sektor pertanian.

2.7. Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

2.7.1. Pengertian Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

Pada dasarnya M-KRPL merupakan suatu himpunan rumah yang mampu mewujudkan kemandirian pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan (Mardiharini, 2011). M-KRPL ditujukan agar masyarakat dapat melakukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, sekaligus melestarikan tanaman pangan untuk masa depan serta tercapai peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk optimalisasi lahan pekarangan. M-KRPL dibangun dari kumpulan Rumah Pangan Lestari (RPL) dalam satu kawasan (RT,

RW, Dusun atau Desa), di mana masing-masing RPL diharapkan memenuhi prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran harian, meningkatkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat (Kementerian Pertanian, 2012).

Pengembangan KRPL merupakan gerakan dari dan untuk masyarakat pedesaan mulai tingkat dusun sampai dengan tingkat Rumah Tangga (RT) yang bekerjasama dengan ibu-ibu Tim Penggerak PKK mulai tingkat provinsi sampai dengan Dasa Wisma dan instansi pemerintah hanya berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan stabilator terhadap gerakan ini (Badan Ketahanan Pangan, 2012).

2.7.2. Tujuan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

Kementerian Pertanian (2011) menyatakan tujuan pengembangan M-KRPL yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) M-KRPL terbagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang:

1. Tujuan Jangka Pendek: a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari; b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun pedesaan untuk bididaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos; c. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan d. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
2. Tujuan Jangka Panjang: a. Kemandirian pangan keluarga; b. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; c. Pelestarian tanaman pangan untuk masa depan; dan d. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan, Jawa Timur (2012) menyatakan bahwa tujuan utama pengembangan M-KRPL adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan keluarga.
2. Meningkatkan penganekaragaman pangan.
3. Meningkatkan kualitas gizi keluarga.
4. Meningkatkan pendapatan keluarga.
5. Menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di setiap desa.

2.7.3. Prinsip Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

Prinsip utama M-KRPL adalah pengelolaan pekarangan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan, dan menjaga kelestariannya melalui Kebun Bibit Desa (KBD), menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Pertanian, 2011).

Prinsip dasar M-KRPL adalah: 1) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, 2) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (3) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan 4) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju 5) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.7.4. Sasaran Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

Sasaran M-KRPL adalah berkembangnya kemampuan keluarga maupun masyarakat secara ekonomi, sosial yang bermartabat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga maupun masyarakat yang mandiri, dan sejahtera (Kementerian Pertanian, 2011). Badan Ketahanan Pangan, Jawa Timur (2012) menyatakan bahwa sasaran M-KRPL adalah:

1. Pemberdayaan ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK Desa dan Dasa Wisma sebagai pelaku dan pengelola pekarangan.
2. Menumbuh kembangkan KBD dan sarana penunjang lainnya.
3. Meningkatkan peran Koperasi Wanita yang ada di setiap desa sebagai sumber permodalan penyedia agroinput dan pemesan hasil produksi baik segar maupun olahan.

Balai Pengkajian Pertanian (BPTP) Jawa Timur (2011) menyatakan bahwa sasaran rumah tangga dalam pengembangan KRPL dikelompokkan menjadi tiga strata berdasarkan luas lahan pekarangan yang dikuasai, adalah: (1) Strata 1 yaitu rumah tangga yang memiliki luas pekarangan $<100 \text{ m}^2$ atau tanpa pekarangan (hanya teras rumah); (2) Strata 2 yaitu rumah tangga yang memiliki luas pekarangan $100\text{-}300 \text{ m}^2$ (kategori sedang); (3) Strata 3 yaitu rumah tangga yang memiliki luas pekarangan $>300 \text{ m}^2$ (kategori luas).

Kementerian Pertanian (2012) menyatakan bahwa sasaran rumah tangga dalam pengembangan KRPL dikelompokkan menjadi dua menurut kelompok pekarangan yaitu: (1) Kelompok pekarangan lahan perkotaan; (2) Kelompok pekarangan lahan pedesaan.

2.7.5. Tahap Pelaksanaan dan Tata Kelola Kegiatan

1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk merencanakan dan melaksanakan pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL), dibutuhkan 9 (Sembilan) tahapan kegiatan seperti telah dituangkan dalam Pedoman Umum Model KRPL (Kementerian Pertanian, 2011), yaitu:

1. Persiapan: (1) Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumberdaya, lokasi dan kelompok sasaran, (2) Pertemuan dengan dinas terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi, (3) Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Terkait lainnya di Kabupaten/Kota, (4) Memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
2. Pembentukan Kelompok: Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga atau satu dusun/kampung. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan berinisiatif dari anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

3. Sosialisasi: Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana instansi terkait.
4. Penguatan Kelembagaan Kelompok: Dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok: (1) Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah; (2) Menaati keputusan yang telah ditetapkan bersama; (3) Memperoleh dan memanfaatkan informasi; (4) Bekerjasama dalam kelompok (sidat gotong royong); dan (5) Bekerjasama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
5. Perencanaan Kegiatan: Melakukan perencanaan/rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran dan obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu dilakukan juga penyusunan rencana kerja untuk satu tahun. Kegiatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan dinas instansi terkait.
6. Pelatihan: Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya: teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan ternak, perbenihan dan pembibitan, pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya adalah tentang penguatan kelembagaan.
7. Pelaksanaan: Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan antara lain oleh Penyuluh dan Petani Andalan. Secara bertahap, pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.
8. Pembiayaan: Bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan dana lain yang tidak mengikat.

9. Monitoring dan Evaluasi: Dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan. Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok. Evaluator dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

2. Tata Kelola Kegiatan

Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan instansi terkait pusat dan daerah, yang masing-masing bertanggungjawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan. Secara rinci, peran setiap elemen tersebut dapat simak pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran masing-masing pelaku dalam pelaksanaan Model KRPL

No	Pelaksana	Tugas/peran dalam Kegiatan
1.	Masyarakat a. Kelompok Sasaran b. Pamong Desa (RT, RW, Kadus) dan Tokoh Masyarakat	a. Pelaku utama b. Pendamping c. Monitoring dan Evaluasi
2.	Pemerintah Daerah (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Lembaga Terkait lainnya)	a. Pembinaan dan pendampingan kegiatan oleh petugas lapang b. Penanggung jawab keberlanjutan kegiatan c. Replikasi kegiatan ke lokasi lainnya
3.	1) Pokja 3, PKK 2) Kantor Ketahanan Pangan	Koordinator lapangan
4.	Dikjen Komoditas/Badan Lingkup Kementerian Pertanian	Pengembangan model sesuai tupoksi instansi
5.	Badan Pengkajian Teknologi Pertanian	a. Membangun model KRPL b. Narasumber dan pengawalan inovasi teknologi dan kelembagaan
6.	Perguruan Tinggi/Swasta/LSM	Dukungan dan pengawalan
7.	Pengembang Perumahan	Fasilitasi pemanfaatan lahan kosong di kawasan perumahan

Sumber: Pedoman Umum Model KRPL, Kementerian Pertanian (2011)

2.7.6. Kebun Bibit Desa

Setiap desa yang mengembangkan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) harus memiliki Kebun Bibit Desa (KBD). KBD merupakan salah satu cara untuk mendukung keberlanjutan M-KRPL. Kementerian Pertanian (2012)

menyatakan bahwa KBD merupakan unit produksi benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan pekarangan, satu Rumah Pangan Lestari (RPL), maupun kawasan. Pengembangan KBD bertujuan agar kebutuhan bibit dan setiap anggota masyarakat yang ada di sekitar desa tersebut dapat dipenuhi dengan mudah di desa sendiri (Badan Ketahanan Pangan, 2012).

Pengembangan KBD dilakukan sebagai sarana pembibitan dan pembenihan tanaman pangan. Pelaksanaan KBD membantu dalam kelancaran produksi tanaman pekarangan terutama yang harus disemai terlebih dahulu seperti: tomat, cabai, terong, sawi, kangkung, bayam, mentimun, dan semangka. Ketersediaan benih atau bibit menjadi kunci keberhasilan program M-KRPL.

2.7.7. Dampak Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)

Kementerian Pertanian (2012) menyatakan dampak yang diharapkan dari pengembangan M-KRPL antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari.
2. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), ternak dan ikan, serta pengolahan hasil dan limbah rumah tangga menjadi kompos.
3. Terjaganya kelestarian dan keberagaman sumber pangan lokal.
4. Berkembangnya usaha ekonomi produktif keluarga untuk menopang kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan lestari dan sehat.

Menurut publikasi dari BPTP kepulauan Bangka Belitung (2012), pengembangan RPL baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, yaitu dalam hal: 1) pendapatan dan pengeluaran, 2) kehidupan sosial, dan 3) lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka yang mengembangkan KRPL di wilayahnya diketahui telah terjadi peningkatan pendapatan dan berkurangnya pengeluaran kebutuhan sayuran bagi rumah tangga rata-rata sebesar Rp 15.000,- per minggu. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu seorang petani bahwa dengan adanya KRPL, pengeluaran belanja sayur yang semula 50.000 per minggu menjadi Rp 35.000,-.

Selain itu, KRPL mampu meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan Pola Pangan Harapan (PPJH).

Dampak lain bagi masyarakat adalah terjalannya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatkan pertemuan antara peserta KRPL. Melalui KRPL ini masyarakat dapat membantu tetangga yang membutuhkan sayuran. Dari aspek lingkungan, pengembangan KRPL mampu menghijaukan kawasan setempat yang terlihat asri dan dapat menurunkan suhu lingkungan kawasan RPL.

2.7.8. Kendala dan Peluang Keberhasilan M-KRPL

Melihat dukungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat tinggi dari aspek pembiayaan terhadap program M-KRPL yang tersebar di berbagai Kabupaten atau Kota belum dapat menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai kendala/masalah yang terdapat pada setiap lokasi penumbuhan M-KRPL. Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur (2012), ada lima kendala dalam pengembangan M-KRPL yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, akses teknologi, dan stake holders. Secara rinci dari masing-masing kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam (SDA)

SDA yang dianggap menjadi kendala kelancaran KRPL di tingkat Kabupaten atau Kota di Jawa Timur yang berhasil diidentifikasi adalah kekurangan air untuk memelihara tanaman pada saat musim kemarau, suhu udara yang dingin dapat menyebabkan tingkat mortalitas yang tinggi terhadap anak ayam buras umur 0 – 14 hari, serangan hama tikus terhadap tanaman bibit/pesemaian di KBD, polusi bau akibat dari pemeliharaan ternak itik.

Ketersediaan air di lokasi penumbuhan KRPL merupakan faktor kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Karena secara umum tanaman yang di usahakan ditanam dalam pot/polybag/paralon/talang plastik. Cara tanam dengan media terbatas sangat rentan sekali dengan kekurangan air. Hal ini terlihat pada saat tanaman tidak dilakukan penyiraman sekitar 3 hari saja kondisinya sudah mulai layu. Untuk mengantisipasi agar tanaman tidak cepat layu, maka harus

dilakukan penyiraman dengan frekuensi yang sangat rapat apalagi pada saat musim kemarau.

Kondisi ekologi misalnya perubahan suhu dingin yang sangat ekstrim dapat juga menyebabkan ternak mati. Hal ini dapat dilihat banyaknya anak ayam buras yang mati akibat dari perubahan cuaca tersebut. Tidak tahannya anak ayam buras terhadap suhu dingin diduga karena memang ciri dari ternak muda. Selain daripada itu kemungkinan pada umur tersebut kondisi tubuhnya masih sangat lemah. Untuk mengantisipasi adanya perubahan suhu yang sangat ekstrem, maka perlu disiapkan teknologi pemanasan terhadap kutuk dengan harapan untuk dapat menekan terjadinya kematian yang tinggi.

Gangguan hama dan penyakit terhadap tanaman merupakan hal yang wajar dalam budidaya tanaman. Jenis hama yang sering mengganggu pada tahap penyemaian di lokasi KRPL tertentu adalah serangan tikus. Apabila gangguan hama tikus ini tinggi pada tahap pesemaian sudah dapat dipastikan bahwa bibit tanaman akan rusak dan tidak dapat digunakan sebagai bahan tanaman yang baik. Perlu di ingat, tikus adalah hama yang paling pintar dan cerdik dibandingkan jenis hama lain. Oleh karena itu untuk mengendalikan atau mengurangi serangan tikus harus dilakukan beberapa cara pengendalian. Misalnya memberi pagar dan penutup dari bahan yang kuat misalnya plastik. Langkah berikutnya adalah menutup lubang-lubang persembunyian dengan pengasapan.

Polusi udara akibat dari bau kotoran ternak tampaknya juga menjadi kendala yang berhasil diidentifikasi di lokasi penumbuhan KRPL. Munculnya masalah ini diduga oleh beberapa penyebab antara lain lokasi pemeliharaan yang sempit, kandang tidak bersih/kotor, tidak disediakan teknologi fermentasi kotoran ternak. Untuk mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak berlarut larut maka perlu dilakukan beberapa upaya misalnya memilih jenis ternak yang selektif, mengganti jenis pemeliharaan lain misalnya tanaman, dan penyertaan teknologi yang ramah lingkungan.

Semua permasalahan SDA tersebut tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut. Segera dicari solusinya, karena apabila dibiarkan akan mengganggu proses kelancaran implementasi pelaksanaan KRPL. Selain dari itu juga selalu melakukan komunikasi secara terstruktur antar pelaku RPL yang ada di kawasan

tersebut. Hal ini menjadi penting karena kegiatan berlangsung di lokasi perumahan dipedesaan/perkotaan dengan lahan yang relatif terbatas.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan pelaku utama program KRPL, untuk itu posisinya sangat strategis dalam kelancaran, kesuksesan, dan keberlanjutannya. Paling tidak ada empat kelompok SDM yang terlibat dalam program KRPL yaitu petugas dari instansi terkait dari tingkat Provinsi dan Kabupaten, petugas pendamping di lapangan, *local champion*, dan ibu-ibu para pelaku RPL setempat. Keempat komponen SDM tersebut seyogyanya dapat berjalan bersama dan beriring untuk saling melengkapi, sehingga dapat menumbuhkan KRPL yang baik. Namun dalam kenyataannya di lapangan belum sinergi secara optimal. Kondisi ini akan berdampak terhadap “*pemformance*” atau penampilan pelaksanaan KRPL. Banyak faktor yang menyebabkan belum sinerginya antara SDM yang satu dengan SDM yang lain.

Berdasarkan data perkembangan KRPL di masing-masing Kabupaten atau Kota, telah dapat diidentifikasi atau direkam kendala-kendala yang muncul terkait dengan SDM. Adapun kendala tersebut antara lain:

- a. Waktunya tidak cukup karena mempunyai lahan yang luas selain di pekarangan
Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pelaku RPL tampaknya mempunyai potensi menghambat yang besar dalam menumbuh kembangkan RPL-RPL yang ada di tingkat pedesaan/perkotaan. Kendala ini sulit untuk di atasi karena waktu yang dimiliki pelaku RPL tercurah seluruhnya untuk keperluan di luar yang berhubungan dengan berlangsungnya kehidupan. Misalnya mempunyai pekerjaan tetap di perusahaan atau jadi pegawai. Alasan yang paling mendasar adalah mencoba hal baru (RPL) yang di luar kebiasaan bukan pekerjaan mudah, karena nilai kepastian yang di dasarkan pada pengalaman tidak ada yang bisa menjamin. Dari pada menemui kegagalan lebih baik menekuni pekerjaan yang sudah lama memberikan hasil. Potret pelaku RPL yang demikian ini masih ada peluang untuk dicari jalan komprominya, misalnya pemilihan jenis tanaman yang tidak perlu pemeliharaan intensif.

b. Kekurangan tenaga kerja untuk memelihara tanaman/ternak

Kekurangan tenaga kerja untuk memelihara tanaman/ternak untuk para pelaku RPL merupakan kendala yang dapat dijumpai. Kondisi ini hampir sama dengan kendala sebelumnya, akan tetapi masih ada perbedaan yaitu pada minat untuk mau melaksanakan. Langkah untuk menyikapi pelaku RPL yang demikian antara lain: memberikan pemahaman secara baik mengenai pentingnya RPL, diberikan kesempatan untuk *learning by proses*, secepat mungkin menunjukkan nilai manfaatnya, dan pendampingan secara intensif. Apabila upaya-upaya tersebut telah dilakukan, selanjutnya dilakukan evaluasi mengenai keberlanjutan pelaksanaannya. Tanpa melakukan tahapan yang demikian akan sulit untuk menentukan sikap selanjutnya. Oleh karena itu sebelum menentukan lokasi dan para pelaku RPL harus diketahui syarat-syarat yang ideal untuk menumbuhkan kembangkan KRPL.

c. Motivasi menurun/jenuh

Motivasi para pelaku KRPL yang menurun merupakan salah satu kendala yang sering di jumpai pada hampir semua lokasi penumbuhan RPL. Indikator yang paling mudah diketahui adalah kurang semangatnya dalam melakukan aktivitas yang terkait dengan RPL. Gejala ini muncul karena ada beberapa faktor yang memicu misalnya tidak sesuainya harapan dan hasil. Pada tahap awal menghendaki jenis tanaman tertentu akan tetapi yang diperoleh tanamannya berbeda. Belum diperoleh manfaat yang optimal baik dari aspek kecukupan kebutuhan rumah tangga dan materi ekonomi. Kemampuan yang terbatas untuk penguasaan teknologi maupun non teknologi. Kreativitas yang rendah para pelaku dan pendamping. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas perlu di bangun komunikasi yang intensif dan jelas antara para pelaku, local champion, petugas pendamping, dan stake holders terkait lainnya.

d. Pengetahuan terbatas terhadap teknologi pertanian tertentu.

Pengetahuan terbatas para pelaku RPL merupakan hal yang sangat wajar, karena program ini merupakan hal baru untuk para ibu-ibu rumah tangga. Pada tahap awal ibu-ibu tidak berpikir tentang cara bertanam yang baik untuk berbagai jenis tanaman pada saat ini harus memikirkan hal tersebut. Perubahan perilaku dari tidak mengetahui teknologi cara tanam ke harus mengetahui teknologi cara

tanam inilah yang dimaksud dengan pengatehuan yang terbatas. Tanpa pengetahuan yang cukup mumpuni dari SDM setempat akan dapat menghambat kelancaran program KRPL. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa tahapan sosialisasi di tingkat lapangan. Bentuk-bentuk sosialisasi dapat dikemas berupa pertemuan di dalam ruangan atau praktek langsung.

3. Kelembagaan

Kendala kelembagaan yang dirasakan oleh para pelaku selama menjalankan program KRPL adalah lemahnya pengelolaan kebun bibit desa (KBD). KBD merupakan bagian kunci dari program penumbuhan RPL-RPL di pedesaan maupun perkotaan. Oleh karena itu pada tahap awal program ini disosialisasikan, kelembagaan KDB harus di rencanakan secara baik keberadaannya. Kondisi yang terjadi saat ini secara umum di masing-masing lokasi KRPL keberadaan KBD di fasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dengan memanfaatkan lahan Desa. Penyediaan fasilitas yang berupa lahan Desa untuk KBD masih belum cukup untuk memperlancar program KRPL tanpa di dukung struktur kelembagaan yang baik. Untuk mewujudkan KBD yang tangguh yaitu dapat melayani kebutuhan bibit tanaman yang diperlukan oleh seluruh para pelaku RPL, maka perlu disusun/dibentuk pengelolanya.

Kelembagaan pengelola KBD yang ideal perlu di tangani oleh para local champion misalnya ketua kelompok tani, ketua gapoktan, ketua kelompok wanita tani, atau yang lainnya. Penyerahan kepengurusan kelembagaan KBD ke para local champion didasarkan beberapa pertimbangan antara lain: mempunyai kemampuan menejemen kelompok, mempunyai kemampuan teknologi pertanian yang lebih di banding yang lain, dapat di percaya (amanah), dan mempunyai jiwa bisnis yang tinggi. Apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi oleh pengelola KBD peluang keberhasilan KRPL sangat tinggi.

4. Akses Teknologi

Kesiapan berbagai macam teknologi cara budidaya tanam di lokasi penumbuhan KRPL menjadi bagian utama dan merupakan skala prioritas. Karena tanpa didukung dengan teknologi yang memadai tingkat keberhasilannya sangat kecil. Selain tersedia, teknologi juga harus mudah untuk diakses, diperoleh, didapatkan, dan dilaksanakan. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan

di masing-masing lokasi penumbuhan KRPL kendala akses teknologi dapat di temukan adalah pelaku RPL belum menguasai tentang pemeliharaan itik. Akibat dari belum dikuasainya teknologi tersebut adalah mortalitas yang sangat tinggi. Belajar dari pengalaman yang ada, maka perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara stake holders, petugas pendamping, dan pelaku RPL terkait dengan kebutuhan teknologi yang langsung diimplementasikan di lapangan.

5. Stake Holders

Unsur penunjang berjalannya program KRPL di lapangan adalah keberadaan *stake holders* mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Para *stake holders* saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menumbuh kembangkan RPL-RPL di masing-masing Kabupaten. Tugas pokok dan fungsi masing-masing sudah sangat jelas. Pada konteks ini dapat diketahui bahwa, pada tahap awal KRPL diinisiasi oleh BPTP Jawa Timur, kemudian pada tahap berikutnya pengembangannya diserahkan ke *stake holders* tingkat Provinsi (Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan). Terlihat jelas pada tahun 2012 sebagian besar penyediaan prasarana dan sarana untuk penumbuhan KRPL di Jawa Timur di penuhi oleh institusi terkait tingkat Provinsi.

Stake holders tingkat Kabupaten membantu mengawal kelancaran pelaksanaan KRPL di lokasi yang telah ditentukan secara bersama-sama. Selain mengawal, tidak tertutup kemungkinan bahkan mungkin juga harus mengalokasikan pembiayaan yang masih belum terpenuhi oleh pembiayaan dari Provinsi. Saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan di tingkat lapangan akan cepat diketahui apabila koordnansi dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. Agar akselerasinya lebih cepat maka secara khusus biasanya institusi Kabupaten menugaskan secara intensif petugas lapangan (PPL) yang berada di wilayah penumbuhan KRPL. Pendampingan yang intesif oleh PPL di masing-masing lokasi KRPL merupakan keputusan yang tepat, karena pelaku RPL-RPL apabila ada kesulitan akan segera dicarikan solusinya.

Pendampingan tidak hanya datang bertemu dengan para pelaku RPL, akan tetapi perlu menyusun rencana kegiatan secara terstruktur baik secara individu maupun kerja kelompok. Hal ini penting, karena dalam menumbuh kembangkan KRPL harus di dukung paling tidak 3 komponen pokok antara lain: pelaku RPL

(ibu-ibu rumah tangga), pelaku inti/*local champion* (pengelola KBD, tokoh masyarakat, perangkat desa), dan penunjang (petugas pendamping di lapangan dari kecamatan/kabupaten, dan institusi terkait dari Kabupaten maupun provinsi). Apabila ketiga komponen tersebut bergerak dalam satu kesatuan langkah, peluang keberhasilan pengembangan KRPL sangat tinggi. Kondisi demikian akan terjadi sinergisme antar berbagai pihak, oleh karena itu terus menerus melakukan koordinasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan fakta di lapangan untuk memulai koordinasi antar *stake holders* ini bukan pekerjaan mudah, karena posisi dari masing-masing dari *stake holders* secara legal formal belum di kukuhkan secara baik/strukturnya belum jelas. Mengingat pentingnya suatu program itu dilaksanakan, maka harus dilengkapi dengan panduan juklak/juknisnya. Tanpa dilengkapi dengan perangkat tersebut, sulit rasanya untuk mensukseskan suatu program, karena dukungan dari *stake holders* nya kurang kuat.

